

Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kelurahan Sememi, Kota Surabaya

Marcella Boedy^{1*}, Shalasa Rafika², Nadya Novitasari³

^{1,2,3}Universitas Wijaya Putra

*Corresponding author: 23031009@student.uwp.ac.id

Abstract

Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius dalam implementasi kebijakan di tingkat kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kelurahan Sememi, Kota Surabaya dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara dengan stakeholder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kelurahan Sememi menghadapi berbagai tantangan, meliputi koordinasi antar instansi, ketersediaan sumber daya, dan partisipasi masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi meliputi komunikasi kebijakan, sumber daya manusia dan anggaran, disposisi implementor, dan struktur birokrasi. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada program-program pencegahan stunting, efektivitas implementasi masih perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan kebijakan nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia agar intervensi yang dilakukan lebih terarah dan berkelanjutan. Upaya edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang, serta pemberdayaan keluarga berisiko perlu dilakukan secara konsisten. Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan lokal, diharapkan program pencegahan stunting dapat berjalan lebih efektif serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan anak.

Kata Kunci: implementasi kebijakan; pencegahan stunting; pemerintahan daerah; kesehatan masyarakat

Introduction

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan. Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 30,8%, yang menunjukkan masalah kesehatan masyarakat yang serius. Kota Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menangani masalah stunting, khususnya di wilayah kelurahan yang memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam (Kementerian Kesehatan RI. (2020)). Kelurahan Sememi merupakan salah satu kelurahan di Kota Surabaya yang menghadapi

tantangan dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya, angka stunting di wilayah ini masih berada di atas rata-rata kota. Hal ini menunjukkan perlunya analisis mendalam mengenai implementasi kebijakan pencegahan stunting di tingkat kelurahan.

Teori implementasi kebijakan dari Edwards (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (*Edwards, G. C. (1980)*). Sementara itu, Grindle (1980) menekankan pentingnya konten kebijakan dan konteks implementasi dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan (*Grindle, M. S. (1980)*). Kedua teori ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami implementasi kebijakan pencegahan stunting di tingkat kelurahan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahayu et al. (2019) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan stunting di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya koordinasi antar sektor, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Studi lain oleh Wahyuni (2020) menekankan pentingnya pendekatan multisektoral dalam pencegahan stunting yang melibatkan berbagai pihak dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. (*Wahyuni, S. (2020)*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kelurahan Sememi, Kota Surabaya dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi sejauh mana kebijakan telah dijalankan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah, tetapi juga menelaah kesesuaian antara perencanaan dan praktik di lapangan. Dalam konteks kebijakan nasional percepatan penurunan stunting yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kajian di tingkat kelurahan menjadi penting untuk melihat bagaimana strategi makro diterjemahkan ke dalam tindakan konkret di tingkat mikro.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran aktor-aktor kunci, seperti aparat kelurahan, tenaga kesehatan, kader posyandu, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Faktor komunikasi, ketersediaan sumber daya, komitmen implementor, serta struktur birokrasi dianalisis sebagai variabel yang berpotensi memengaruhi efektivitas implementasi. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi hambatan, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya literasi gizi masyarakat, dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang aplikatif

guna meningkatkan kualitas implementasi kebijakan pencegahan stunting secara berkelanjutan.

Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kelurahan Sememi, Kota Surabaya. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses, dinamika, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Dengan fokus pada konteks sosial dan administratif setempat, penelitian ini berupaya memahami bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam program konkret serta sejauh mana kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat sasaran.

Metode analisis data yang digunakan adalah literature review yang dikombinasikan dengan analisis dokumen kebijakan dan wawancara mendalam dengan stakeholder terkait, seperti aparatur kelurahan, tenaga kesehatan, serta kader posyandu. Literature review dilakukan untuk mengkaji konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu mengenai stunting dan implementasi kebijakan publik. Analisis dokumen difokuskan pada regulasi, pedoman teknis, serta laporan pelaksanaan program. Sementara itu, wawancara mendalam bertujuan menggali perspektif, pengalaman, dan kendala yang dihadapi para pelaksana kebijakan. Kombinasi metode ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid, mendalam, dan relevan dengan kondisi faktual di lapangan.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang meliputi:

1. Lurah Sememi,
2. Kepala Puskesmas setempat,
3. Kader posyandu
4. Perwakilan masyarakat, dan
5. Petugas gizi dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan program, dan data statistik terkait stunting di Kelurahan Sememi.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Kerangka analisis yang digunakan adalah

teori implementasi kebijakan Edwards (1980) dengan empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. (Edwards, G. C. (1980).

Results

Profil Wilayah Penelitian

Lokasi: Kelurahan Sememi, Kota Surabaya **Status:** Kelurahan dengan angka stunting di atas rata-rata kota **Karakteristik:** Wilayah dengan beragam kondisi sosial ekonomi masyarakat

Tabel 1. Tren Prevalensi Stunting (2020-2023)

Tahun	Jumlah Balita	Balita Stunting	Persentase
2020	1.250	325	26,0%
2021	1.180	295	25,0%
2022	1.200	276	23,0%
2023	1.220	256	21,0%

Sumber: Puskesmas Sememi, 2023

Komunikasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan pencegahan stunting di Kelurahan Sememi menghadapi beberapa tantangan. Sosialisasi kebijakan dari tingkat pusat hingga kelurahan telah dilakukan melalui berbagai media, namun masih terdapat gap dalam pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting. Kader posyandu berperan sebagai ujung tombak dalam mengkomunikasikan program kepada masyarakat, namun kapasitas mereka dalam menyampaikan informasi teknis masih perlu ditingkatkan. (Rahayu, A., Yulidasari, F., & Anggraini, L. (2019).

Komunikasi antar instansi juga menjadi tantangan tersendiri. Koordinasi antara kelurahan, puskesmas, dan dinas kesehatan masih perlu diperkuat untuk memastikan konsistensi pesan dan sinkronisasi program. Hal ini sejalan dengan temuan Edwards (1980) yang menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan konsisten dalam implementasi kebijakan.

Kondisi Aktual di Lapangan:

Sosialisasi Program

Upaya sosialisasi kebijakan pencegahan stunting telah dilaksanakan secara menyeluruh dari tingkat pusat hingga kelurahan dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi yang tersedia. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan masyarakat mengenai pentingnya upaya pencegahan stunting, yang menunjukkan bahwa penyampaian informasi belum sepenuhnya efektif dalam mengubah persepsi dan perilaku masyarakat.

Dalam konteks implementasi program, kader posyandu memiliki peran strategis sebagai ujung tombak komunikasi program stunting kepada masyarakat di tingkat *grassroot*. Mereka menjadi penghubung langsung antara kebijakan pemerintah dengan masyarakat sasaran. Namun, kapasitas kader dalam menyampaikan informasi teknis terkait stunting masih memerlukan peningkatan yang berkelanjutan, baik dari segi penguasaan materi maupun keterampilan komunikasi, agar pesan-pesan penting tentang pencegahan stunting dapat tersampaikan dengan lebih efektif dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Koordinasi Antar Instansi

Implementasi program pencegahan stunting menghadapi tantangan signifikan dalam hal koordinasi antar instansi, khususnya antara kelurahan, puskesmas, dan dinas kesehatan yang seharusnya bekerja secara sinergis. Konsistensi pesan dan sinkronisasi program di antara ketiga level institusi tersebut masih memerlukan penguatan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam sistem dapat bergerak secara harmonis menuju tujuan yang sama. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Edwards (1980), komunikasi yang jelas dan konsisten merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga ketiadaan koordinasi yang efektif dapat menghambat pencapaian target program. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur dan sistematis untuk menjembatani gap komunikasi antar instansi, memastikan alur informasi yang lancar, serta menjaga konsistensi pesan yang disampaikan kepada masyarakat sasaran di setiap tingkatan implementasi program.

Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya menjadi faktor kritis dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting. Sumber daya manusia yang tersedia di Kelurahan Sememi, khususnya tenaga kesehatan dan kader posyandu, masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan program. Anggaran yang dialokasikan untuk program pencegahan stunting juga belum optimal, terutama untuk kegiatan pendampingan dan monitoring berkelanjutan. (Sutrisno, E. (2021).

Infrastruktur pendukung seperti posyandu dan fasilitas kesehatan dasar telah tersedia, namun masih memerlukan peningkatan kualitas dan akses. Ketersediaan alat ukur antropometri dan suplemen gizi juga perlu dipastikan kontinuitasnya untuk mendukung efektivitas program.

Kondisi Aktual di Lapangan :

Sumber Daya Manusia

Implementasi program pencegahan stunting menghadapi kendala serius dalam aspek sumber daya manusia, di mana jumlah tenaga kesehatan dan kader posyandu yang tersedia masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan program yang cukup besar dan kompleks. Keterbatasan ini tidak hanya terletak pada aspek kuantitas, tetapi juga kualitas, dimana masih terdapat gap dalam pengetahuan teknis dan keterampilan konseling yang dibutuhkan untuk memberikan edukasi dan pendampingan yang efektif kepada masyarakat. Selain itu, variasi tingkat komitmen dan dukungan dari aparat kelurahan turut mempengaruhi keberhasilan program, karena tidak semua aparat memiliki pemahaman dan dedikasi yang sama terhadap pentingnya pencegahan stunting. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan program pelatihan dan capacity building yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas seluruh pihak yang terlibat, sehingga mereka dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan program pencegahan stunting di tingkat komunitas.

Sumber Daya Anggaran

Aspek pembiayaan menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi program pencegahan stunting, dimana alokasi anggaran yang tersedia belum mencapai level optimal untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan yang diperlukan. Keterbatasan anggaran ini terutama dirasakan pada kegiatan pendampingan dan monitoring berkelanjutan, yang sebenarnya merupakan komponen krusial untuk memastikan sustainabilitas dan efektivitas program di lapangan. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya intensitas dan kualitas supervisi serta evaluasi program yang dapat dilakukan secara rutin. Selain itu, sistem insentif dan pengakuan untuk para implementor di tingkat lapangan, seperti kader posyandu dan tenaga kesehatan, masih memerlukan perbaikan yang signifikan untuk meningkatkan motivasi dan komitmen mereka dalam menjalankan program. Ketidakefektifan dalam aspek pembiayaan ini pada akhirnya dapat menghambat pencapaian target program dan mengurangi dampak

positif yang seharusnya dapat diraih dalam upaya pencegahan stunting di masyarakat.

Infrastruktur dan Fasilitas

Infrastruktur dan fasilitas kesehatan di wilayah tersebut sudah mencakup keberadaan posyandu dan berbagai fasilitas kesehatan dasar yang dapat diakses oleh masyarakat. Namun, kualitas layanan serta akses terhadap fasilitas tersebut masih memerlukan peningkatan agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal. Selain itu, ketersediaan alat ukur antropometri dan suplemen gizi harus dipastikan keberlanjutannya agar program kesehatan, terutama yang berkaitan dengan pemantauan status gizi, dapat berjalan dengan efektif. Dengan memperkuat dan mengembangkan infrastruktur kesehatan dasar yang memadai, hal ini menjadi peluang penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat.

Disposisi Implementor

Sikap dan komitmen implementor dalam menjalankan kebijakan pencegahan stunting menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Petugas kesehatan dan kader posyandu umumnya menunjukkan komitmen yang tinggi, tercermin dari konsistensi mereka dalam melakukan pemantauan tumbuh kembang balita, penyuluhan gizi, serta kunjungan rumah bagi keluarga berisiko. Mereka juga berperan aktif dalam menyosialisasikan program yang sejalan dengan kebijakan nasional percepatan penurunan stunting yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam pengetahuan teknis dan keterampilan konseling, terutama dalam memberikan edukasi yang persuasif dan berbasis bukti kepada orang tua balita.

Di sisi lain, dukungan dari aparat kelurahan juga bervariasi, tergantung pada prioritas pembangunan dan tingkat pemahaman mereka terhadap urgensi pencegahan stunting sebagai isu strategis. Sebagian aparat menunjukkan komitmen melalui pengalokasian anggaran dan fasilitasi kegiatan lintas sektor, sementara yang lain belum menjadikan program ini sebagai agenda utama. Variasi sikap tersebut berimplikasi pada efektivitas koordinasi dan kesinambungan program. Oleh karena itu, penguatan kapasitas implementor serta peningkatan kesadaran dan komitmen pimpinan wilayah menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan pencegahan stunting berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Motivasi implementor juga dipengaruhi oleh sistem insentif dan pengakuan yang diberikan. Program-program pelatihan dan capacity building perlu diperkuat untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi implementor di tingkat kelurahan.

Kondisi Aktual di Lapangan :

Kondisi aktual di lapangan menunjukkan adanya sikap dan komitmen yang beragam dari para pelaksana program. Petugas kesehatan dan kader posyandu umumnya menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, meskipun terdapat variasi signifikan dalam sikap para implementor. Dukungan dari aparat kelurahan juga bervariasi, bergantung pada prioritas dan pemahaman masing-masing pihak. Motivasi para implementor dipengaruhi oleh sistem insentif serta pengakuan yang diterima, yang menjadi faktor penting dalam menjaga semangat mereka. Dari segi kapasitas, terdapat keterbatasan dalam pengetahuan teknis serta keterampilan konseling, namun partisipasi aktif kader posyandu menjadi kekuatan yang dapat diandalkan. Di sisi lain, komitmen pemerintah daerah terhadap upaya pencegahan stunting tergolong tinggi, menunjang keberhasilan pelaksanaan program di lapangan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kelurahan Sememi melibatkan berbagai tingkatan dan instansi. Koordinasi vertikal dari pusat hingga kelurahan telah terbentuk, namun koordinasi horizontal antar sektor masih perlu diperkuat. Mekanisme pelaporan dan monitoring telah ditetapkan, namun implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan administratif. Standard Operating Procedures (SOP) untuk program pencegahan stunting telah tersedia, namun sosialisasi dan implementasinya di tingkat kelurahan masih belum optimal. Sistem informasi untuk monitoring dan evaluasi juga perlu diperkuat untuk memastikan akurasi data dan efektivitas program.

Kondisi Aktual di Lapangan :

Koordinasi Vertikal dan Horizontal

Kondisi aktual di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi vertikal dari pusat hingga kelurahan telah terbentuk dengan baik, namun koordinasi horizontal antar sektor masih membutuhkan penguatan lebih lanjut. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai tingkatan dan instansi sehingga membutuhkan sinergi yang lebih efektif antar pihak terkait. Dari sisi sistem operasional, Standard Operating Procedures (SOP) telah tersedia sebagai panduan kerja,

tetapi sosialisasi dan implementasi SOP di tingkat kelurahan belum berjalan secara optimal. Selain itu, mekanisme pelaporan dan monitoring menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif yang menghambat kelancaran proses. Oleh karena itu, sistem informasi untuk monitoring dan evaluasi perlu diperkuat guna memastikan data yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Tantangan dan Peluang

Implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kelurahan Sememi menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran,
2. koordinasi antar sektor yang belum optimal,
3. partisipasi masyarakat yang masih terbatas, dan
4. sistem monitoring dan evaluasi yang belum efektif.

Namun terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan, meliputi:

1. komitmen pemerintah daerah yang tinggi terhadap pencegahan stunting,
2. keberadaan infrastruktur kesehatan dasar yang memadai,
3. partisipasi aktif kader posyandu, dan
4. dukungan dari berbagai pihak termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat.

Kondisi Aktual di Lapangan :

Tantangan Utama di Lapangan

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi kebijakan pencegahan stunting menghadapi tantangan:

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi kebijakan pencegahan stunting di lapangan menghadapi beberapa tantangan utama. Pertama, keterbatasan sumber daya, baik dari segi sumber daya manusia maupun anggaran, menjadi kendala yang signifikan, disertai dengan kebutuhan peningkatan kapasitas teknis para implementor. Kedua, koordinasi antar sektor masih belum optimal, termasuk dalam sinkronisasi program lintas instansi yang diperlukan untuk efektivitas pelaksanaan kebijakan. Ketiga, partisipasi masyarakat masih terbatas, yang dipengaruhi oleh adanya kesenjangan pemahaman tentang stunting. Keempat,

sistem monitoring dan evaluasi yang belum berjalan efektif juga menjadi hambatan, dengan kendala teknis dan administratif dalam pelaporan yang memperlambat proses.

Rahayu et al. (2019) menegaskan bahwa kendala koordinasi antar sektor, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya partisipasi masyarakat merupakan faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan pencegahan stunting di Indonesia. Namun demikian, data lapangan juga menunjukkan sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas program tersebut. Komitmen pemerintah daerah yang tinggi serta dukungan kebijakan dari berbagai tingkatan menjadi modal kuat dalam pencegahan stunting. Selain itu, keberadaan infrastruktur kesehatan dasar yang memadai dan jaringan posyandu yang telah terbentuk menjadi potensi strategis. Partisipasi aktif kader posyandu dan komitmen tinggi tenaga kesehatan juga merupakan aset penting.

Dukungan multi-stakeholder, termasuk sektor swasta dan keterlibatan organisasi masyarakat, memperkuat pendekatan multisektoral yang menurut Wahyuni (2020) sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Dengan memanfaatkan peluang ini secara optimal, tantangan yang ada dapat diminimalisir untuk mencapai hasil yang lebih baik. *Referensi: Wahyuni (2020) - pentingnya pendekatan multisektoral dalam pencegahan stunting yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.*

Conclusion

Implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kelurahan Sememi, Kota Surabaya telah menunjukkan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Namun, efektivitas implementasi masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi secara komprehensif. Faktor komunikasi kebijakan perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas kader dan penguatan koordinasi antar instansi. Sumber daya manusia dan anggaran perlu ditingkatkan untuk mendukung keberlanjutan program. Disposisi implementor perlu diperkuat melalui program pelatihan dan sistem insentif yang tepat. Struktur birokrasi perlu disederhanakan dan koordinasi antar sektor perlu diperkuat.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus yang terbatas pada satu kelurahan saja, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan dengan hati-hati. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif di berbagai kelurahan dengan karakteristik yang berbeda

untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang implementasi kebijakan pencegahan stunting di tingkat kelurahan.

Rekomendasi yang dapat diberikan meliputi:

1. penguatan koordinasi antar sektor melalui pembentukan tim terpadu pencegahan stunting di tingkat kelurahan,
2. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan berkelanjutan,
3. pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, dan
4. peningkatan partisipasi masyarakat melalui program edukasi dan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Acknowledgments

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Kelurahan Sememi, Puskesmas setempat, dan seluruh kader posyandu yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih juga kepada masyarakat Kelurahan Sememi yang telah berpartisipasi sebagai responden penelitian.

Reference

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2019). *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Ejournal Unitomo. (2025). *Faktor-Faktor Penyebab Stunting dan Solusi yang Diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya*
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the third world*. New Jersey: Princeton University Press.
- Journal of Universitas Airlangga. (2022). *Peta Potensi Pengentasan Stunting Di Kota Surabaya*
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). *Rencana Aksi Nasional dalam Rangka Penurunan Stunting: Rembuk Stunting*. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden RI.

- Rahayu, A., Yulidasari, F., & Anggraini, L. (2019). Implementasi kebijakan pencegahan stunting di Indonesia: Analisis faktor pendukung dan penghambat. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 8(2), 78-85.
- Sutrisno, E. (2021). Evaluasi program pencegahan stunting di tingkat puskesmas: Studi kasus di Kota Surabaya. *Indonesian Journal of Public Health*, 15(3), 234-245.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2019). *Panduan Konvergensi Program/Kegiatan Pencegahan Stunting*. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden RI.
- Wahyuni, S. (2020). Pendekatan multisektoral dalam pencegahan stunting: Pembelajaran dari berbagai negara. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 15(1), 45-52.
- World Health Organization. (2021). *Reducing stunting in children: Equity considerations for achieving the Global Nutrition Targets 2025*. Geneva: WHO Press. Sumber: Puskesmas Sememi, 2023